

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau disingkat dengan DKI Jakarta adalah Ibu Kota Negara Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, DKI Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan DKI Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan Internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta. Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 6.977,5 km<sup>2</sup> serta tercatat kurang lebih 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah Kotamadya dan satu Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu (jakarta.go.id, 2019).

Provinsi DKI Jakarta masih menjadi magnet bagi para urbanisasi atau pendatang untuk mengadu nasib karena daya tarik Provinsi DKI Jakarta sebagai tujuan untuk mendapatkan pekerjaan, dan penghidupan lebih layak bagi para pendatang baru. Oleh karena itu, masyarakat yang berpindah dari suatu daerah ke kota meningkat tiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta (id.beritasatu, 2019). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Provinsi DKI Jakarta, 2018.

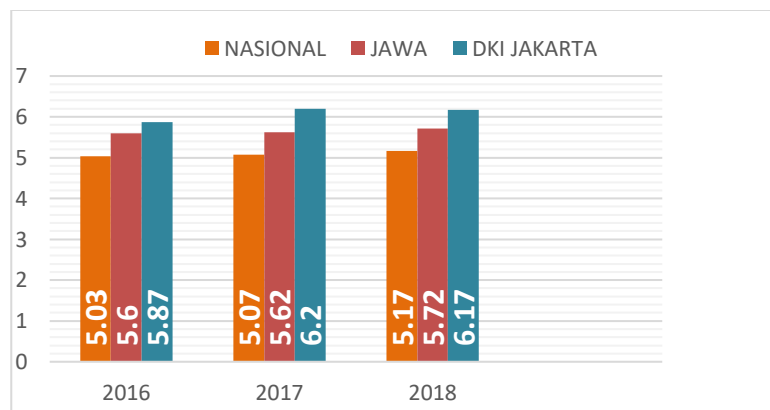
<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	461.794	444.147	905.941
5-9	472.159	455.206	927.365
10-14	394.643	370.999	765.642
15-19	355.617	354.567	710.184
<b>20-24</b>	<b>372.793</b>	<b>411.459</b>	<b>784.252</b>
<b>25-29</b>	<b>468.262</b>	<b>497.588</b>	<b>965.850</b>
30-34	523.215	508.986	1.032.201
35-39	495.643	475.638	971.281
40-44	429.869	412.091	8.419.60
45-49	362.091	349.920	712.011
50-54	296.955	293.992	590.947
55-59	230.049	236.745	466.794
60-64	167.221	173.024	340.245
65+	214.379	238.577	452.956
<b>Jumlah</b>	<b>5.244.690</b>	<b>5.222.939</b>	<b>10.467.629</b>

*Sumber :Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2018.*

Menurut data Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 tercatat memiliki sekitar 10.467.629 penduduk, salah satu penduduk yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta adalah penduduk dewasa muda yaitu 20 sampai 29 tahun dengan jumlah penduduk 1.750.102 jiwa, dewasa muda adalah sekumpulan orang yang berada diantara umur 20 sampai 29 tahun (Wheelwright, 2011:8). Penduduk usia muda merupakan penentu kualitas bangsa Indonesia di masa depan dan merupakan aset yang paling berharga dari suatu bangsa. Oleh sebab itu, penduduk usia muda perlu dibina, agar potensi yang dimilikinya dapat menghasilkan kontribusi yang positif bagi pembangunan nasional (republika.co.id, 2019). Salah satunya, dengan memiliki pengetahuan tentang keuangan. Penduduk dewasa muda di DKI Jakarta diharapkan lebih menaruh perhatian yang lebih khusus tentang keuangan, karena pengetahuan keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan seseorang dan keluarga di masa depan serta membantu penduduk dewasa muda dalam pengelolaan dan pembuatan keputusan tentang keuangan mereka.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta hingga akhir tahun 2018 dengan pertumbuhan di atas 6 persen mengindikasikan tetap terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi ibu kota. Kinerja perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2018 masih tercatat pada kisaran tinggi meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 2019, BI).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Nasional, Jawa dan Jakarta

*Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Februari 2019, BI.*

Gambar 1.1 menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selalu lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan ekonomi Jawa dan Nasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, dalam hal ini artinya peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi tersebut (Mankiw, 2007:72).

Dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang relatif baik, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta yang ditandai dengan kondisi kemiskinan yang dapat diperbaiki (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 2018, BI). Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrumen yang sangat

berpengaruh dalam penurunan kemiskinan. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan (Kraay, 2006).

Tabel 1. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta

Bulan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
September 2017	393.130 orang	3,78%
Maret 2018	373.120 orang	3,57%
September 2018	372.260 orang	3,55%

*Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2018.*

Berdasarkan data pada tabel 1.2 persentase penduduk miskin di DKI pada September 2018 turun menjadi 3,55 persen yang mencakup sejumlah 372,26 ribu orang, dibandingkan dengan Maret 2018 yang mencapai 3,57 persen dan September 2017 yang mencapai 3,78 persen (jakarta.bps.go.id, 2018).

Menurunnya pertumbuhan garis kemiskinan ini, diimbangi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang menjadi faktor pendorong membaiknya kondisi kesejahteraan di DKI Jakarta (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional September 2018, BI). Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebesar Rp3.355.750, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp3.648.035 dan pada tahun 2019 menjadi Rp3.940.973 (Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2019, BPS).

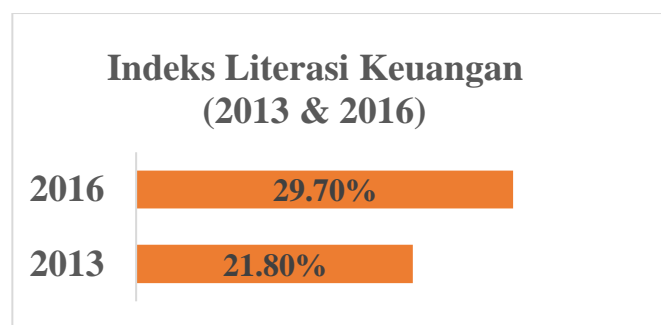
Akan tetapi, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di DKI Jakarta, menyebabkan perilaku masyarakat tersebut cenderung konsumtif, terutama DKI Jakarta merupakan kota besar yang penuh dengan kesibukan yang membuat seseorang cenderung menginginkan sesuatu yang serba cepat, mudah dan praktis termasuk untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (Tamonsang, 2018). Dorongan untuk hidup konsumtif dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya berbagai kemudahan transaksi serta gaya hidup yang diterapkan, hal ini terkadang membuat seseorang tidak rasional dalam membelanjakan uangnya. Seperti saat ini, seseorang tidak harus mempunyai uang atau tabungan untuk dapat berbelanja, karena pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu kredit (Margaretha dan

Sari, 2015). Berdasarkan data Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), pengguna kartu kredit yang beredar di masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 16.043.347 dan terus melonjak naik hingga tahun 2018 mencapai sebanyak 17.275.128 kartu kredit yang beredar (Statistik Sistem Pembayaran 2018, BI). Berkembangnya kartu kredit yang menjadi solusi dalam bertransaksi dapat menimbulkan berbagai masalah, diantaranya pengguna yang tidak mampu membayar tagihannya (Margaretha dan Sari, 2015). Kartu kredit membuat perilaku hidup konsumtif dengan berbelanja berlebihan bahkan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, untuk itu belanja dengan kartu kredit membutuhkan komitmen dan kontrol diri yang kuat dan pengguna harus mempertimbangkan besarnya hutang yang ditanggung setelahnya (finansialku.com, 2019).

Perilaku konsumtif juga dapat mengancam masyarakat usia muda, seperti gaya hidup anak muda di kota besar khususnya DKI Jakarta yang memiliki budaya *hedonisme*, *hedonisme* yang mengarah pada perilaku konsumtif dapat menimbulkan masalah keuangan. Pendapatan atau uang saku anak muda dapat habis untuk sekedar membeli makanan, pakaian, perangkat elektronik, hiburan seperti menonton film dan perilaku konsumtif lainnya. Fenomena seperti ini dikatakan sudah menjadi kateistik, jika pengeluaran anak muda selalu melebihi kemampuan (moneysmart.id, 2019). Selain itu, perilaku konsumtif disebabkan karena kemudahan akses untuk pemenuhan kebutuhan saat ini. Masyarakat usia muda yang sudah lekat dengan penggunaan internet telah menikmati berbagai fasilitas dari kecanggihan teknologi saat ini serta dengan adanya sarana internet maka semakin mudah bagi masyarakat usia muda untuk berbelanja via sosial media secara praktis tanpa harus bepergian. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, dibutuhkan generasi muda yang memiliki karakter kuat dan mampu memiliki pemikiran jangka panjang untuk masa depan sehingga dapat bertahan di era digital saat ini, sikap yang mampu mengendalikan diri dan peduli terhadap perencanaan keuangan sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk mencegah perilaku yang sifatnya konsumtif dan merugikan diri sendiri di masa depan (Damayanti et al., 2019). Dilansir pada finance.detik.com (2017) masyarakat usia muda masih menganggap hal yang berkaitan dengan keuangan sebagai sesuatu yang kurang

penting dan belum memiliki pengendalian untuk menghindari keinginan yang tidak penting, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku pengelolaan keuangan masih sangat rendah.

Kondisi ini kemudian perlu didukung oleh pemahaman masyarakat terhadap *financial literacy*. *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD (2017:87) mendefinisikan *financial literacy* merupakan pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, seperti keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif serta meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well-being*) individu dan masyarakat. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang sebagai keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan menjadi kemampuan menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et al., 2016). Sedangkan *financial literacy* yang buruk membentuk seseorang mempunyai opini yang keliru dan membuat keputusan yang salah dalam pengetahuan dasar, *saving and borrowing* serta pada investasi (Chen dan Volpe, 1998).

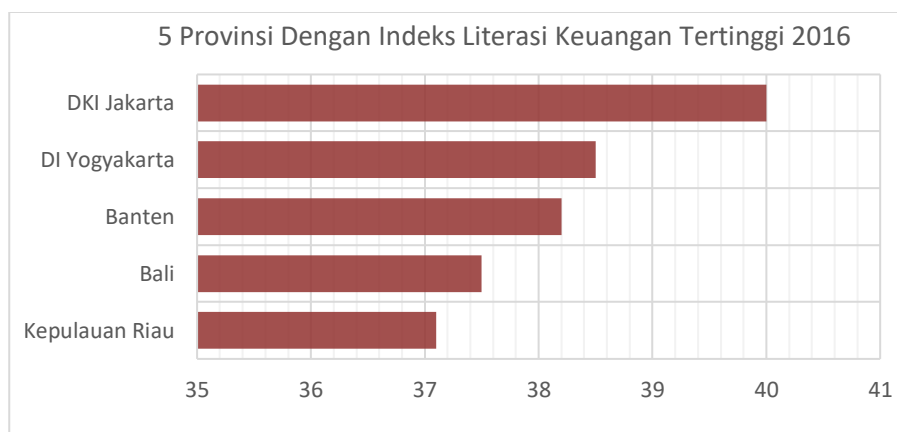


Gambar 1. 2 Indeks Literasi Keuangan di Indonesia Tahun 2013 dan 2016

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) indeks *financial literacy* masyarakat Indonesia tahun 2013 hanya sekitar 21,8% yang berarti dari setiap 100 penduduk hanya sekitar 22 orang yang termasuk kategori *well-literate*. *Well literate* berarti orang tersebut memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan

risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Pada tahun 2016 indeks *financial literacy* meningkat menjadi 29,7%, meskipun mengalami peningkatan, angka *financial literacy* di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat *financial literacy* di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia memiliki tingkat *financial literacy* 66%, Filipina 27%, Thailand 73% dan Singapura 98% (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit 2017, Otoritas Jasa Keuangan).



Gambar 1. 3 Provinsi Dengan Indeks Literasi Keuangan Tertinggi 2016

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Berdasarkan gambar 1.3, lima provinsi dengan indeks *financial literacy* tertinggi yaitu DKI Jakarta memiliki indeks *financial literacy* mencapai 40%, diikuti oleh DI Yogyakarta 38.5%, Banten 38.2%, Bali 37.5% dan Kepulauan Riau 37.1%. Dengan kondisi seperti ini, ditengarai masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit 2017, Otoritas Jasa Keuangan).

Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi oleh *financial literacy* dapat mengakibatkan berbagai efek negatif dan salah satunya adalah stres keuangan (Garman et al., 1996). Kurangnya pemahaman untuk mengelola keuangan (*financial literacy*) akan memperburuk tingkat *stress*, tingkat *stress* yang semakin meningkat akan menyebabkan adanya *financial distress* (Kim et al., 2006). *Financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum

terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Platt dan Platt, 2002). Menurut Sina dan Raturomon (2012) *financial distress* pada umumnya terjadi karena ketidakcukupan keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu maupun seluruh anggota keluarga. Ketidakcukupan keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, menjadi penyebab utama stres pada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan seperti DKI Jakarta harus menghadapi biaya hidup yang sangat tinggi (nasional.republika.co.id, 2019).

Meskipun demikian, *financial distress* yang dihadapi oleh individu bukan hanya disebabkan oleh ketidakcukupan keuangan atau rendahnya tingkat penghasilan, tingginya tingkat penghasilan seseorang juga tidak dapat menjamin kehidupan seorang individu dapat sejahtera, karena tanpa adanya pengelolaan keuangan yang tepat, keamanan finansial pasti akan sulit dicapai, kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin konsumtif dan dapat memacu pemborosan (Krishna et al., 2010). Menurut Stamp (2009) *financial distress* juga timbul dari kurangnya tanggung jawab pribadi seperti sikap negatif terhadap pembayaran tagihan dan ketidaksungguhan membayar hutang. Kelompok masyarakat yang memiliki *financial literacy* lebih baik dapat melalui masa-masa sulit keuangan karena memiliki tabungan, mengasuransikan diri dan hartanya serta melakukan diversifikasi investasinya (Silaen, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Idris et al., 2013) mengenai hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* di antara dewasa muda di Malaysia menghasilkan penelitian bahwa, terdapat hubungan positif lemah antara *financial literacy* dan *financial distress*. Jika responden memiliki tingkat *financial literacy* yang tinggi, maka mereka akan mengalami tingkat *financial distress* yang lebih tinggi. Temuan menunjukkan bahwa hanya sedikit responden memiliki tingkat *financial distress* yang tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh efektivitas inisiatif pemerintah Malaysia untuk mengatasi dampak kenaikan biaya hidup, khususnya di daerah perkotaan.



Berdasarkan data di atas penulis menyatakan perlu adanya penelitian mengenai hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* pada dewasa muda di DKI Jakarta karena diharapkan dengan penelitian ini akan membawa pengaruh yang lebih baik lagi kepada masyarakat dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta agar lebih menaruh perhatian yang lebih khusus tentang keuangan agar tidak mengalami kesulitan keuangan, karena *financial literacy* mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan seseorang dan keluarga di masa depan serta membantu penduduk dewasa muda dalam pengelolaan dan pembuatan keputusan tentang keuangan mereka.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa dan Nasional. Dengan kinerja perekonomian DKI Jakarta yang relatif cukup baik, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta yang ditandai dengan kondisi kemiskinan yang dapat diperbaiki, diimbangi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang menjadi faktor pendorong membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional September 2018, BI). Akan tetapi, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat DKI Jakarta, menyebabkan perilaku masyarakat tersebut cenderung konsumtif. Perilaku konsumtif juga dapat mengancam masyarakat usia muda, seperti gaya hidup anak muda di kota besar khususnya Jakarta yang memiliki budaya *hedonisme*, *hedonisme* yang mengarah pada perilaku konsumtif dapat menimbulkan masalah keuangan. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi oleh *financial literacy* dapat mengakibatkan berbagai efek negatif dan salah satunya adalah stres keuangan (Garman et al., 1996). Kurangnya pemahaman untuk mengelola keuangan (*financial literacy*) akan memperburuk tingkat *stress*, tingkat *stress* yang semakin meningkat akan menyebabkan adanya *financial distress* (Kim et al., 2006).

Penelitian Idris et al., (2013) menemukan terdapat hubungan positif lemah antara *financial literacy* dan *financial distress*. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa responden memiliki tingkat *financial distress* yang tinggi dan tingkat *financial literacy* yang tinggi pula. Beberapa studi terdahulu yang terkait dengan

masalah *financial literacy* dan *financial distress* tidak menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai studi kasus. Dikarenakan perbedaan faktor-faktor pada demografi dan geografi tersebut maka studi kasus untuk masalah tersebut di Provinsi DKI Jakarta perlu untuk diteliti.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sebelumnya maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *financial attitude* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana tingkat *financial behavior* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana tingkat *financial knowledge* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?
4. Bagaimana tingkat *financial literacy* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?
5. Bagaimana tingkat *financial distress* pada dewasa muda muda di Provinsi DKI Jakarta?
6. Apakah terdapat hubungan antara *financial attitude* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?
7. Apakah terdapat hubungan antara *financial behavior* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?
8. Apakah terdapat hubungan antara *financial knowledge* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?
9. Apakah terdapat hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat *financial attitude* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat *financial behavior* pada dewasa muda muda di Provinsi DKI Jakarta.

3. Untuk mengetahui tingkat *financial knowledge* pada dewasa muda muda di Provinsi DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui tingkat *financial literacy* pada dewasa muda muda di Provinsi DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui tingkat *financial distress* pada dewasa muda muda di Provinsi DKI Jakarta.
6. Untuk mengetahui hubungan antara *financial attitude* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta.
7. Untuk mengetahui hubungan antara *financial behavior* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta.
8. Untuk mengetahui hubungan antara *financial knowledge* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta.
9. Untuk mengetahui hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* pada dewasa muda di Provinsi DKI Jakarta.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan bagi perkembangan keilmuan di bidang ilmu *behavioral finance* khususnya mengenai *financial literacy* dan *financial distress* dikalangan anak muda di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

#### **a. Untuk Otoritas Jasa Keuangan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan *financial literacy* dan menekan *financial distress* masyarakat dengan memberikan sosialisasi mengenai produk dan pelayanan keuangan.

#### **b. Untuk Masyarakat DKI Jakarta**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penduduk DKI Jakarta memiliki *financial literacy* yang lebih baik di masa depan agar *financial distress* dapat ditekan.

## **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I berisi mengenai tinjauan objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III berisi mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV berisi mengenai hasil dan pembahasan tentang karakteristik responden yang dilihat dari berbagai aspek, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.